

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Secara Praktis	10
1.5. Kerangka Konsep	10
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PENGATURAN DANA PENSIUN	
2.1. Pengertian Dana Pensiun	19
2.2. Jenis dan Dana Program Dana Pensiun	20
2.3. Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas	25
a. Pendiri	25
b. Pengurus	26
c. Dewan Pengawas	28
2.4. Asas-Asas Pokok Dalam Ketentuan Dana Pensiun	29
a. Asas-Asas Pokok Sebagai Ass Hukum	29

b.	Asas Keterpisahan Kekayaan Dana Pensiun dan Asas Penyelenggaraan Dalam Sistem Pendanaan	30
c.	Asas Pembinaan dan Pengawasan	33
d.	Asas Penundaan dan Manfaat	34
e.	Asas Kebebasan untuk Membentuk atau Tidak Membentuk Dana Pensiun	35
f.	Prinsip kehati-hatian	39
2.5.	Segi Hukum Perdata Dana Pensiun	43
a.	Hubungan Hukum Dana Pensiun Sebagai Bagian Hukum Perdata	43
b.	Hubungan Hukum antara Dana Pensiun dengan Peserta Aktif	45
a)	Kepesertaan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja	46
b)	Hak-hak Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja	47
c)	Kewajiban Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja	48
d)	Tanggung Jawab Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja	48
e)	Kepesertaan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan	48
f)	Hak Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan	49
g)	Kewajiban Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan	49
2.6.	Hubungan Hukum Dana Pensiun Merupakan Perikatan Timbal Balik Berdasarkan Ketetapan Waktu.....	50

BAB III

KASUS POSISI DAN PENYELESAIAN PERKARA

3.1.	Pihak-pihak yang Berperkara	52
3.2.	Duduk Perkara	53
3.3.	Pendapat Para Pihak	55
3.4.	Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim	57

BAB IV	ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN	
4.1.	Kontribusi Perusahaan dalam Program Dana Pensiun apakah dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurangan besaran pesangon pada saat pensiun	58
	A. Putusan Hukum Majelis hakim	58
	B. Pendapat Penulis.....	58
4.6.	Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 101/PL/G2006/PHI.PN.JKT.PST dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	67
	A. Putusan Hukum Majelis hakim	67
	B. Pendapat Penulis.....	67
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	69
5.2.	Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA.....	71
	LAMPIRAN	
	• Indonesia Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279;	
	• Indonesia Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, LN No. 37 Tahun 1992, TLN No. 3477;	
	• Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 101/PL/G2006/PHI.PN.JKT.PST	